

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat dan Iran cenderung sering berinteraksi, akan tetapi interaksi kedua negara tidak membuat keduanya memiliki hubungan yang baik. Hubungan Amerika Serikat dan Iran terus mengarah pada hubungan yang konfliktual pasca revolusi Iran yang terjadi pada 1979. Melalui program pembangunan nuklir Iran, Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan yang sangat keras dengan menjatuhkan embargo terhadap Iran. Bahkan Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Presiden George W. Bush mengeluarkan pernyataan bahwa Iran dibawah kepemimpinan Presiden Ahmadinejad telah melakukan pengembangan senjata pemusnah massal berupa senjata nuklir (Rahman, 2003). Ditambah dengan adanya perbedaan pandangan akan berbagai hal, semakin menunjukkan bahwa kedua negara tersebut memiliki hubungan yang konfliktual.

Amerika Serikat juga merupakan salah satu negara yang pernah turut melakukan campur tangan di Iran. Pada era sebelum revolusi, Iran merupakan negara dengan sistem monarki absolut yang dipimpin oleh seorang Raja. Pada era inilah, beberapa negara barat dianggap mencampuri urusan dalam negeri Iran, seperti kepemilikan sumber daya alam seperti minyak bumi. Kala Syah Mohammad Reza Pahlevi menjabat, ia dianggap sebagai boneka milik Barat yang digunakan untuk menguasai Iran. Penilaian tersebut muncul karena di era kepemimpinan Mohammad Reza Pahlevi terdapat keleluasaan negara barat dalam menguasai sumber daya yang dimiliki Iran.

Munculnya rasa tidak percaya dengan kepemimpinan Syah Mohammad Reza Pahlevi inilah yang kemudian mendorong terjadinya peristiwa Revolusi Iran atau dikenal juga dengan Revolusi Islam. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1979, yang mendorong Syah Mohammad Reza Pahlevi untuk turun dari kepemimpinannya, sekaligus merubah Iran menjadi negara Republik Iran yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini. Pada 16 Januari 1979, Syah Mohammad Reza Pahlevi meninggalkan Iran untuk menuju tempat pengasingannya setelah kepemimpinan atas Iran telah dialihkan (Iran Chamber Society, 2023).

Bersamaan dengan terjadinya Revolusi Iran, hubungan Amerika Serikat dan Iran turut menjadi keruh. Iran yang sudah menjadi negara Republik Iran, dipimpin oleh Ayatollah Khomeini yang memiliki semangat nasionalis. Kondisi ini yang kemudian menjadikan Iran

tidak lagi mudah dikendalikan oleh negara barat termasuk Amerika Serikat. Industri minyak dan nuklir milik Iran tidak lagi bisa dikendalikan oleh barat. Kondisi ini yang kemudian menjadi faktor pendorong bagi Amerika Serikat untuk menjatuhkan embargo ekonomi sebagai bentuk sanksi kepada Iran atas pengembangan industri nuklirnya. Amerika Serikat menilai bahwa pengembangan sektor nuklir Iran ini berpotensi mengancam keamanan internasional sehingga diperlukan tindakan tegas untuk mencegah kemungkinan buruk itu.

Sebagai negara super power, Amerika Serikat sering memberlakukan sanksi ekonomi seperti embargo ekonomi kepada beberapa negara dengan berbagai alasan. Beberapa negara yang mendapatkan sanksi ekonomi dari Amerika Serikat, diantaranya adalah Kuba, Korea Utara, Iran, Syria, Rusia, dan sebagian Ukraina yang berada dibawah teritorial Rusia (Liberto, 2022). Adapun untuk embargo ekonomi yang diberlakukan Amerika Serikat untuk Iran adalah mengenai pengembangan teknologi nuklir yang dimiliki negara tersebut. Dimana menurut Amerika Serikat, teknologi nuklir yang dimiliki Iran dinilai merupakan ancaman bagi perdamaian internasional. Sehingga dengan upaya memberlakukan embargo ekonomi terhadap Iran, mengharapkan agar Iran akan berhenti mengembangkan teknologi nuklir mereka.

Embargo ekonomi merupakan bentuk sanksi yang dijatuhkan suatu negara kepada negara lain dengan tujuan mengubah kebijakan luar negeri negara yang dijatuhi embargo ekonomi. Tindakan ini dirasa dapat memberikan hasil yang diinginkan, karena dengan adanya embargo ekonomi maka perekonomian negara tujuan akan mengalami kendala maupun masalah, seperti defisit hingga inflasi. Kondisi ekonomi yang memburuk setelah mengalami embargo ekonomi inilah yang diharapkan akan membuat negara tujuan pada akhirnya mengubah kebijakan luar negerinya sesuai dengan yang diinginkan negara pemberi embargo, agar negara mereka terlepas dari embargo. Hal inilah yang diharapkan Amerika Serikat sebagai pemberi embargo ekonomi kepada beberapa negara, termasuk Iran. Adapun embargo ekonomi yang diberikan Amerika Serikat kepada Iran sudah dimulai sejak tahun 1979 ketika Iran mengalami revolusi dan masih berlanjut hingga saat ini.

Dalam sejarah pemberian embargo ekonomi atas Iran oleh Amerika Serikat, sejatinya Iran memang mengalami berbagai kesulitan dalam perekonomian negaranya. Sehingga pada 14 Juli 2015, disepakatilah perjanjian nuklir Iran yang disebut *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) oleh Iran P5+1 (anggota Dewan Keamanan PBB + Jerman) dan Uni Eropa. Dalam perjanjian ini, Iran menyatakan beberapa poin, bahwa mereka akan mengurangi sebagian besar cadangan uranium yang dimiliki, membatasi kegiatan pengayaan uranium, serta

mengalihfungsikan beberapa fasilitas terkait uranium untuk menghindari kemungkinan pengembangan senjata nuklir. Sebagai ganti dari kesediaan Iran melakukan poin-poin terkait pengembangan nuklir, maka Iran akan mendapatkan kebebasan dari sanksi ekonomi. Melalui kesepakatan ini, Iran memiliki kesempatan untuk memulihkan perekonomiannya. Pada awalnya kesepakatan ini berjalan dengan baik, akan tetapi mulai mengalami kekacauan yang tidak terduga pada 8 Mei 2018. Presiden Amerika Serikat kala itu, Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan menarik diri dari JCPOA (Paramasatya & Wiranto, 2019).

Hubungan Amerika Serikat dan Iran selama ini memang tidak bisa dikatakan tenang, hubungan keduanya kian memanas ketika Iran menerbitkan surat penangkapan terhadap Presiden Amerika Serikat kala itu, Donald Trump. Keputusan Iran itu merupakan buntut pengeboman yang dilakukan Amerika Serikat menggunakan pesawat nirawak di dekat Bandara Internasional Baghdad, tindakan ini yang kemudian mengakibatkan tewasnya Mayor Jenderal Iran, Qasem Soleimani (Pristiandaru, 2020). Peristiwa serangan udara ini terjadi pada tanggal 3 Januari 2020 waktu subuh hari di dekat Bandara Internasional Irak di Baghdad. Penyerangan ini menewaskan beberapa orang, diantaranya 2 tokoh penting, yaitu Qasem Soleimani yang merupakan kepala Pasukan Elite Quds Iran kemudian korban tewas lainnya adalah Abu Mahdi Al-Muhandis yang merupakan Wakil Komandan Milisi yang didukung Iran yang dikenal sebagai Popular Mobilisation Forces atau PMF (Aljazeera, 2020).

Adapun Amerika Serikat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa penyerangan yang menewaskan Qasem Solaimani ini memiliki alasan atas keputusan itu, seperti yang disampaikan oleh Presiden mereka kala itu, Donald Trump. Dalam pidatonya, ia menyampaikan “Amerika Serikat menilai bahwa Soleimani sedang merencanakan serangan yang akan segera terjadi dan menyeramkan terhadap diplomat dan personel militer Amerika Serikat, akan tetapi kami menangkap dan menghentikannya”. Trump juga menambahkan “Dibawah kepemimpinan saya, kebijakan Amerika Serikat tidak ambigu. Teroris yang menyakiti atau berniat menyakiti warga Amerika manapun akan kami temukan anda, kami akan melenyapkanmu. Kami akan selalu melindungi diplomat kami, anggota layanan, semua orang Amerika dan juga sekutu kami”. Kemudian Trump juga memberikan pernyataan yang menolak bahwa tindakan penyerangan yang menewaskan Qasem Soleimani adalah tindakan untuk memulai perang, Ia berkata “*We took action last night to stop a war. We did not take action to start a war*” (Trump White House, 2020).

Jenderal Qasem Soleimani merupakan Perwira Militer senior Iran dalam Pasukan Pengawal Revolusi Iran atau Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). Selain itu, Soleimani juga menjadi komandan dari pasukan Quds sejak tahun 1998. Dimana pasukan ini merupakan suatu divisi yang bertanggung jawab atas operasi ekstrateritorial dari Iran. Bahkan ia juga merupakan bagian dari veteran perang Iran-Irak yang mana telah aktif terlibat dalam berbagai konflik Timur Tengah.

Dengan banyaknya kontribusinya dalam sektor militer menjadikan Qasem Soleimani tokoh sentral di Iran maupun Timur Tengah. Karir militernya dimulai tak lama setelah revolusi Iran pada tahun 1979. Dimana Soleimani bahkan mengambil peran dalam proses pembentukan Republik Islam Iran. Tak hanya itu, menurut jurnalis Adam Taylor, Soleimani lebih dari siapapun bertanggung jawab atas penciptaan '*arc of influence*' atau '*axis of resistance*' yang membentuk dari teluk Oman melalui Irak, Suriah, dan Lebanon ke pantai Timur Laut Mediterania (Taylor, 2020).

Pasukan Al-Quds yang dipimpin oleh Qasem Soleimani ini juga memiliki pengaruh besar di Iran dan Timur Tengah. Menurut sejarah panjangnya, pasukan Quds memiliki peran penting dalam proses pendirian Hezbollah di Lebanon pada awal 1980-an. Dibawah kepemimpinan Soleimani, pasukan Quds juga terus memperluas pengaruh di wilayah tersebut. Bahkan setelah Amerika Serikat berhasil melakukan invasi ke Irak serta berhasil menggulingkan presiden Irak, Saddam Hussein pada tahun 2003, Pasukan Quds mulai memberikan bantuan pada milisi Syiah di negara itu untuk berperang melawan pasukan Amerika Serikat. Bahkan menurut pentagon dalam rentang waktu 2003 sampai 2011, estimasi Tentara Amerika Serikat yang tewas di Irak akibat pasukan Quds mencapai 608 orang (Mangkuto, 2020).

Dengan banyaknya kontribusi Qasem Soleimani di Iran, menjadikan beliau sebagai tokoh penting dan berpengaruh. Ditambah fakta bahwa kematiannya merupakan tindakan yang dilakukan dengan sadar dan terencana oleh Amerika Serikat, maka pembunuhan Mayor Jenderal Qasem Soleimani ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pembunuhan politik atau *political assassination*. Adapun *political assassination* sendiri merupakan suatu tindakan membunuh orang terkemuka atau penting seperti Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Politikus, Pemimpin Dunia, CEO, dan Anggota Kerajaan. Tindakan pembunuhan politik ini sendiri dapat dilatarbelakangi alasan militer dan politik, keuntungan finansial, balas dendam,

ketenaran, perintah dari militer, keamanan, pemberontak, atau kelompok polisi rahasia (Britannica, 2023).

Berdasarkan fakta terkait embargo ekonomi yang sudah diberlakukan Amerika Serikat kepada Iran sejak revolusi di tahun 1979 yang masih berlangsung hingga saat ini, yang mana dilatarbelakangi oleh sektor nuklir yang terus dikembangkan oleh Iran. Ditambah dengan penggunaan kekuatan militer oleh Amerika Serikat yang menewaskan Jenderal Qasem Soleimani pada 3 Januari 2020, yang dapat dikategorikan sebagai bentuk political assassination, mengingat posisi dan pengaruh besar yang dimiliki Qasem Soleimani di negaranya. Dengan begitu, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana hubungan dua hal tersebut serta bagaimana dampaknya pada embargo ekonomi Amerika Serikat terhadap Iran.

B. Rumusan Masalah

Hubungan Amerika Serikat dan Iran yang cenderung tidak akur, terlebih sejak Revolusi 1979 masih berlanjut hingga saat ini, dua negara ini cenderung sering bersitegang dalam beberapa kesempatan, terlebih terkait isu nuklir Iran. Kemampuan dan sumber daya Iran akan nuklir dinilai merupakan ancaman oleh Amerika Serikat. Dengan begitu, sejak Iran mengalami revolusi di tahun 1979, Amerika Serikat mulai menjatuhkan embargo ekonomi kepada Iran. Embargo ekonomi terus berlanjut sejak saat itu, tetapi sempat membaik di tahun 2015 ketika JCPOA disepakati, dimana Iran mendapatkan keringanan atas sanksi-sanksi ekonomi karena bersedia mengurangi cadangan dan kegiatan pengembangan uranium. Akan tetapi embargo ekonomi atas Iran kembali diberlakukan ketika Amerika Serikat hengkang dari JCPOA pada 2018, sejak itulah kedua negara tersebut kembali bersitegang. Amerika Serikat semakin gencar memberlakukan embargo ekonomi dan Iran juga harus menghadapi embargo ekonomi Amerika Serikat. Puncak dari kondisi ini adalah ketika Amerika Serikat melakukan penyerangan yang menewaskan Qasem Soleimani pada 3 Januari 2020. Dengan begitu, penulis menentukan rumusan masalah **“Bagaimana dampak dari peristiwa pembunuhan Qasem Soleimani oleh Amerika Serikat terhadap efektivitas embargo ekonomi terhadap Iran?”**

C. Kerangka Berpikir

Embargo Ekonomi

Embargo secara bahasa termuat dalam Cambridge Dictionary sebagai, embargo (*verb*) merupakan “*to officially stop trading with another country*”, yang maknanya adalah tindakan resmi untuk menghentikan perdagangan dengan negara lain (Cambridge Dictionary, n.d.). Sedangkan terdapat artian lain, embargo merupakan suatu bentuk kebijakan pemerintah yang mana melarang para pengusahanya untuk melangsungkan transaksi dengan badan-badan usaha niaga yang bertempat di negara-negara tempat embargo tersebut diberlakukan (Holsti, 1988). Berdasarkan dua definisi tersebut, embargo dapat dipahami sebagai tindakan yang disengaja oleh suatu negara yang bertujuan sebagai sanksi atas negara tujuan yang dijatuhi embargo.

Embargo ekonomi juga dapat dipahami sebagai suatu pembatasan perdagangan yang biasanya diadopsi oleh pemerintah, sekelompok negara-negara, ataupun organisasi internasional yang ditujukan sebagai bentuk sanksi ekonomi. Perspektif teoritis yang dominan memandang sanksi ekonomi sebagai bentuk nyata tawar-menawar antar aktor negara, akan tetapi tawar-menawar disini cenderung memiliki ketimpangan atau hanya salah satu pihak yang memiliki kepentingan atas pihak lain, yang berusaha dicapai dengan menerapkan sanksi ekonomi berupa embargo (Felbermayr, Morgan, Syropoulos, & Yotov, 2021). Sanksi ekonomi dapat menjadi alat kebijakan yang menarik bagi pemerintah yang ingin mengekspresikan ketidakpuasan atas perilaku suatu negara, bisa diperdebatkan jika dari perspektif ekonomi. Sanksi bisa mencapai perubahan yang sering dibayangkan melalui tindakan hukuman yang diambil, embargo ekonomi ini bertujuan untuk menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup untuk membawa perubahan perilaku pada negara target. Dimana ketika negara target sudah mengalami kemunduran dalam perekonomiannya, maka mampu memicu adanya perubahan perilaku bahkan perubahan kebijakan yang diinginkan negara yang memberikan embargo (Ellis, n.d.).

Dalam penggunaannya, embargo ekonomi kemungkinan dibarengi dengan penggunaan kekuatan militer yang meningkat secara signifikan (Lektzian & Sprecher, 2007). Hal ini pun terlihat dari tindakan Amerika Serikat yang sudah memberlakukan embargo ekonomi kepada Iran pasca revolusi negara mullah tersebut. Kemudian embargo ekonomi yang merupakan bentuk sanksi kepada Iran itu dibarengi dengan penggunaan kekuatan militer baik dari Amerika Serikat sebagai pemberi embargo maupun Iran sebagai penerima embargo. Salah satu penggunaan militer yang memicu respon serius dari Iran adalah ketika Amerika Serikat

melakukan penyerangan yang menewaskan Qasem Soleimani yang merupakan Jenderal Militer Iran (Dzulfaroh, 2020). Selain itu, hal serupa juga pernah dilakukan oleh Amerika Serikat kepada Pemerintahan Irak dibawah kepemimpinan Saddam Husein. Rentetan sanksi ekonomi yang diberlakukan Amerika Serikat kala itu belum berhasil membuat Irak menuruti tujuan pemberlakuan embargo terhadap Irak. Kondisi ini yang kemudian mendorong penggunaan kekuatan militer oleh Amerika Serikat, yaitu perang antara kedua negara yang berlangsung di Irak (Haass, 1998).

Keberhasilan penerapan embargo ekonomi dipengaruhi beberapa hal, diantaranya adalah tujuan yang diinginkan negara pemberi embargo ekonomi. Semakin sederhana tujuan yang ingin dicapai dengan menerapkan embargo ekonomi, maka semakin besar kesempatan embargo ekonomi untuk berhasil. Sebaliknya, semakin kompleks tujuan yang ingin dicapai, maka semakin kecil kemungkinan embargo ekonomi berhasil diterapkan (Killian & Karman, 2022). Dalam kasus Amerika Serikat yang memberlakukan embargo ekonomi pada Iran, tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Amerika Serikat adalah terkait sektor nuklir Iran yang dinilai merupakan ancaman. Dimana nuklir merupakan objek yang kompleks bagi Iran, karena menurut Ahmadinejad, sektor nuklir Iran ditujukan untuk hal damai, diantaranya sebagai pembangkit listrik bagi negara tersebut. Dengan begitu nuklir merupakan kepentingan dari negara mullah tersebut.

Adapun efektivitas embargo ekonomi bisa dikatakan efektif dengan mengukur kerusakan yang timbul pada negara yang ditargetkan dan perubahan perilaku negara target yang sesuai dengan keinginan negara pemberi embargo ekonomi. Ketika negara target mengalami kerusakan yang parah pada perekonomian bahkan kondisi keseluruhan negaranya sehingga menimbulkan perubahan sikap dan kebijakan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh negara pemberi embargo, maka, penggunaan embargo ekonomi berhasil dilakukan. Karena ketika perekonomian dan keadaan negara mengalami krisis maka akan memungkinkan timbulnya perubahan perilaku yang berpengaruh pada perubahan kebijakan yang sesuai dengan keinginan negara yang menjatuhkan embargo. Dengan begitu, maka kepentingan negara pemberi embargo diharapkan bisa terpenuhi melalui embargo ekonomi (Felbermayr, Morgan, Syropoulos, & Yotov, 2021).

Embargo ekonomi yang ditujukan Amerika Serikat sebagai hukuman bagi negara sasaran diberlakukan dengan tujuan mengubah perilaku politik dan/atau militer negara tersebut (Liberto, 2022). Dalam kasus Amerika Serikat yang menjatuhkan embargo ekonomi kepada

Iran sendiri, bertujuan untuk membuat Pemerintah Iran mengubah kebijakan mereka terkait pengembangan nuklir, yang menjadi perhatian Amerika Serikat. Akan tetapi perlu diingat bahwa pada kenyataannya, embargo ekonomi cenderung lebih efektif untuk menghukum negara-negara sasaran daripada membuat mereka mengubah perilaku politik mereka. Dalam kasus Amerika Serikat dan Iran pun terlihat bahwa perekonomian Iran mendapatkan pengaruh dengan mengalami penurunan akan tetapi tidak sampai pada tahap mengubah kebijakan mereka terkait pengembangan nuklir.

Adapun setelah melewati masa perang dunia dan perang dingin, sanksi ekonomi seperti embargo cenderung lebih diminati oleh negara-negara dibandingkan dengan melakukan intervensi militer. Karena dengan penggunaan sanksi mampu meminimalisir biaya dan korban jiwa, jika dibandingkan dengan intervensi militer. Amerika Serikat sendiri menerapkan embargo ekonomi sebagai sanksi kepada beberapa negara, seperti Kuba, Korea Utara, Iran, Syiria, Rusia, dan Ukraina yang berada dibawah teritorial Rusia (Liberto, 2022). Embargo ekonomi Amerika Serikat kepada Iran sudah diberlakukan sejak Iran mengalami revolusi dan masih berlangsung hingga saat ini. Meskipun dalam perjalanannya, embargo atas Iran ini pernah sempat berhasil diringankan melalui perjanjian JCPOA pada 2015, tetapi kembali diberlakukan sejak hengkangnya Amerika Serikat dari perjanjian ini pada 8 Mei 2018.

Kepentingan Nasional

Konsep Kepentingan Nasional atau dikenal juga sebagai *national interest* ini merupakan salah satu konsep dalam studi Hubungan Internasional yang mana didalamnya menyatakan bahwa setiap negara akan selalu terlibat dalam proses memenuhi atau mengamankan kepentingan nasional mereka. Adapun kepentingan nasional ini mencakup beberapa aspek, seperti politik, keamanan, sosial, dan ekonomi. Menurut Theodore Coulombis dan James Wolfe “Kepentingan nasional masih menjadi konsep yang sangat penting dalam setiap upaya mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksikan atau membuat preskripsi tentang perilaku internasional suatu negara” (Bakry, 2017). Definisi kepentingan nasional lainnya adalah menurut Charles Beard, yaitu “Kepentingan nasional adalah alasan (*raison d'etat*) dibelakang tujuan-tujuan serta ambisi-ambisi negara dalam menjalankan hubungan internasional” (Bakry, 2017). Jika melihat kompleksitas cakupan kepentingan nasional, sudah tentu kebijakan luar negeri masing-masing negara akan dirumuskan berdasarkan kepentingannya dan selalu bekerja untuk mengamankan tujuannya.

Kehadiran konsep kepentingan nasional ini menjadi acuan negara dalam mengeluarkan kebijakan luar negeri, karena pada dasarnya keberhasilan sebuah negara dalam mencapai kepentingannya sangat bergantung dari kebijakan luar negerinya.

Konsep kepentingan nasional adalah kepentingan atau tujuan yang hendak dicapai suatu negara dengan menggunakan semua sarana yang ada, sehingga mampu memaksimalkan pencapaian *national interest* yang dimiliki negara tersebut. Realis memandang kepentingan nasional sebagai ambisi negara dalam mencapai kepentingan ekonomi, militer, budaya maupun ideologi. Dimana ketika negara mencapai kepentingan nasional, maka negara akan mencapai posisi yang lebih baik dan mampu menjamin eksistensi serta stabilitas negaranya. Teori realis sendiri berasumsi bahwa negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional, sehingga negara memiliki dorongan kuat untuk mencapai kepentingan nasional.

Menurut Realis, negara adalah aktor utama yang harus mengidentifikasi kepentingan atau kebutuhan apa saja yang dimiliki negaranya. Kemudian kepentingan-kepentingan yang sudah diidentifikasi ini nantinya akan diupayakan secara maksimal dengan memanfaatkan politik luar negeri dan diplomasi. Disini dapat dipahami bahwasannya negara adalah supremasi politik tertinggi di masyarakat dan anarkisme dalam politik internasional hanya bisa ditanggulangi oleh negara sebagai aktor teratas dalam hubungan internasional. Oleh karenanya, negara adalah satu-satunya aktor, sehingga kebijakan luar negeri hanya mengakui negara sebagai entitas tunggal. Maka, “kepentingan nasional” merupakan “kepentingan negara” yang dilandaskan oleh kekuasaan yang dimiliki negara tersebut (Burchill, 2005).

Menurut Hans. J. Morgenthau, perilaku negara dalam hubungan internasional adalah untuk menjaga agar elemen-elemen kekuatan yang dimiliki negara agar tetap dapat menjamin kedaulatannya diantara negara lain. Adapun sebagai konsekuensinya, menjaga konstelasi kekuatan politik di tingkat internasional tetap seimbang. Dari sini dapat dipahami dengan jelas bahwasannya penanggung jawab utama untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara adalah negara itu sendiri (Burchill, 2005).

Adapun dalam penelitian ini, baik Amerika Serikat dan Iran memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing, meskipun dalam kenyataannya keduanya sudah memutuskan hubungan diplomatik sejak 1980 (Widiyani, 2020). Salah satu kepentingan Amerika Serikat atas Iran adalah mengenai sektor nuklir, dimana pengembangan nuklir yang dilakukan Iran dinilai Amerika Serikat sebagai bentuk persenjataan yang mengancam keamanan internasional, terlebih Iran dinilai sebagai negara yang mendukung jejaring terorisme di Timur Tengah.

Dalam kondisi ini, Amerika Serikat merasa memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa nuklir yang dimiliki Iran serta bentuk dukungan Iran atas tindak terorisme di Timur Tengah tidak akan mengganggu keamanan negaranya, sekutunya di Timur Tengah dan keamanan internasional. Sedangkan Iran, memiliki kepentingan untuk membebaskan diri dari embargo ekonomi dan intervensi negara lain terlebih terkait sektor nuklir (Wahyuni, Sushanti, & Nugraha, 2017). Dengan demikian, konsep kepentingan nasional ini dirasa akan mampu membantu penulis dalam menjabarkan dan menjelaskan hasil temuan untuk penelitian ini.

D. Hipotesis

Dengan menggunakan kerangka berpikir Embargo Ekonomi dan Kepentingan Nasional, penelitian ini menunjukkan bahwa **“Pembunuhan Qasem Soleimani oleh Amerika Serikat justru mengurangi efektivitas embargo ekonomi atas Iran”**. Hal ini dikarenakan embargo ekonomi yang sudah dijatuhkan Amerika Serikat kepada Iran sejak bertahun-tahun lalu sebenarnya sudah memberikan dampak signifikan pada perekonomian Iran, akan tetapi eskalasi ketegangan di kawasan justru mengurangi efektivitas embargo ekonomi atas Iran. Karena nuklir yang merupakan kepentingan nasional dan tujuan yang ingin dicapai Amerika Serikat melalui embargo adalah tujuan yang kompleks, sehingga sulit untuk dicapai dengan memberlakukan embargo ekonomi. Meskipun embargo ekonomi yang sudah diberlakukan sejak bertahun-tahun lalu sudah memberikan dampak signifikan pada perekonomian Iran, tetapi Iran juga mendapatkan bantuan dari negara-negara sekutu yang berhasil mengurangi dampak embargo ekonomi atas negaranya. Adapun Amerika Serikat menggunakan kekuatan militer dengan membunuh Qasem Soleimani justru menciptakan ancaman bagi posisi mereka sebagai pihak yang menjatuhkan embargo ekonomi kepada Iran.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah mengetahui bagaimana dampak dari peristiwa pembunuhan Qasem Soleimani yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap efektivitas embargo ekonomi terhadap Iran.

F. Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Untuk meneliti topik ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang kemudian dianalisa dengan tujuan untuk bisa mendapatkan

pendapat atau pandangan yang lebih rinci dari sumber-sumber tertulis. Penelitian ini akan mengedepankan kedalaman (kualitas) data, dan bukan banyaknya (kuantitas) data. Metode kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang hasilnya berupa data deskriptif. Data ini berbentuk kata-kata yang tertulis ataupun verbal dari orang-orang dan perilaku yang diamati atau dikaji. Pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian ini.

Adapun sumber data yang dipakai sebagai referensi adalah sumber data sekunder berupa buku, web, jurnal, artikel, berita atau penelitian yang sudah ada sebelumnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis dalam artikel ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang akan digunakan untuk menganalisa bagaimana peristiwa pembunuhan Qasem Soleimani oleh Amerika Serikat sebagai upaya meningkatkan efektivitas embargo ekonomi atas Iran. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bertumpu pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya (Moloeng, 2007).

G. Jangkauan Penelitian

Dalam rangka membatasi penjelasan dan analisis mengenai peningkatan efektivitas embargo ekonomi atas Iran oleh Amerika Serikat melalui pembunuhan Qasem Soleimani, maka diperlukan limitasi guna menentukan fokus penelitian ini. Jangkauan penelitian ini dibatasi pada fakta dan data yang berkaitan dalam kurun waktu tahun 2018-2022.

H. Sistematika Tulisan

Dalam rangka memperjelas arah pembahasan pada penelitian ini, penulis membagi sistematika kepenulisan kali ini menjadi 5 bab sebagai berikut:

BAB I sebagai pendahuluan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesis, tujuan penelitian, metode pengumpulan dan analisa data, jangkauan penelitian, serta sistematika tulisan.

BAB II membahas tentang politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Iran. Pembahasan diawali dengan perubahan besar hubungan antara Amerika Serikat dan Iran sejak Revolusi Islam Iran di bawah Pimpinan Ayatollah Ruhollah Khomeini pada tahun 1979 yang mengakibatkan Amerika Serikat mengenakan berbagai jenis tekanan politik dan militer, termasuk embargo ekonomi terhadap Iran hingga dewasa ini.

BAB III membahas tentang fakta terjadinya peristiwa pembunuhan Jenderal Qaseem Soleimani oleh Amerika Serikat. Dimulai dengan pemaparan latar belakang pembunuhan itu, kemudian membahas terjadinya peristiwa pembunuhan itu sendiri sebagai sebetulnya *political assassination*, dan diakhiri dengan pembahasan terhadap respons atas peristiwa tersebut, baik dari Amerika Serikat, dari Iran, maupun dari dunia internasional.

BAB IV membahas efektivitas embargo ekonomi Amerika Serikat terhadap Iran, yakni bagian pertama membicarakan efektivitas embargo sebelum pembunuhan Qasem Soleimani kemudian efektivitas embargo tersebut pasca pembunuhan Qasem Soleimani.

BAB V berisi kesimpulan meliputi temuan yang paling penting dari penelitian ini, kemudian kontribusi hasil riset ini terhadap perkembangan ilmu Hubungan Internasional, dan diakhiri dengan pengakuan atas keterbatasan riset ini disertai saran untuk penelitian lebih lanjut.